

RINGKASAN

Alya Novyandini Zahra 210510267 **Penyelesaian Sengketa Pembebasan Tanah Untuk Jalan Tol Tebing Tinggi-Indra Pura (Studi Penelitian di Kecamatan Tebing Sahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara)**
(Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum. dan Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum.)

Penyelesaian sengketa pertanahan yang diatur dalam Pasal UU Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur penyelesaian sengketa tentang kepentingan umum, dan PERMEN No 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengatur tata ruang dan ketentuan harga yang diberikan. Pemilik tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol mengklaim bahwa harga ganti kerugian tanah yang diberikan pihak jalan tol tidak sesuai dengan harga yang diberikan pada setiap pemilik tanah hal tersebut memicu berkembangnya konflik antara para pemilik tanah dan pihak jalan tol. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah, hambatan, dan serta upaya penyelesaian hukum diberikan oleh pemerintah terhadap lahan yang terkena proyek jalan tol, berdasarkan perundang-undangan Indonesia terhadap pemberian penyelesaian sengketa tanah dalam kasus jalan tol.

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris, dengan pendekatan kasus yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui pengumpulan serta analisis data primer dan data sekunder melalui kegiatan wawancara langsung dengan informan dan responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa mekanisme, seperti musyawarah, mediasi, hingga gugatan ke pengadilan. Penyelesaian sengketa pembebasan tanah dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, khususnya yang mengatur pembangunan dan pengelolaan jalan tol, Kendala utama yang dihadapi meliputi ketidaksepakatan mengenai nilai ganti rugi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, serta hambatan administratif dalam proses penilaian tanah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak awal, transparansi dalam penentuan nilai ganti rugi melalui tim independen, serta pendampingan hukum bagi warga terdampak.

Saran dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses pembebasan tanah dan meminimalkan potensi konflik di masa depan. Hasil kajian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah, para pejabat, dan aparat dalam mengelola konflik pembebasan tanah, khususnya untuk proyek infrastruktur strategis.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Pembebasan Tanah, Jalan Tol.

SUMMARY

Alya Novyandini Zahra
210510267

Settlement of Land Acquisition Dispute for Tebing Tinggi-Indra Pura Toll Road (Research Study in Tebing Sahbandar District, Serdang Bedagai Regency, North Sumatra Province)
(Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum. dan Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum.)

Settlement of land settlements regulated in Article Law Number 2 of 2012 which regulates the settlement of settlements regarding public interests, and PERMEN No. 19 of 2021 concerning the Implementation of Land Acquisition for Development in the Public Interest which regulates spatial planning and the provisions of the prices given. Land owners affected by the toll road construction project claim that the land compensation price given by the toll road party does not match the price given to each land owner, this triggers the development of conflicts between land owners and the toll road party. The study aims to determine and analyze how the land settlement resolution mechanism, obstacles, and legal settlement efforts provided by the government for land affected by the toll road project, based on Indonesian laws and regulations regarding the provision of land settlements in toll road cases.

This research uses an empirical juridical type, with a case approach, namely a research procedure that produces descriptive data through the collection and analysis of primary and secondary data through direct interviews with informants and respondents. This research uses a qualitative type, with an empirical juridical approach, namely a research procedure that produces descriptive data through the collection and analysis of primary data through direct interviews with related parties.

The results of the study indicate that dispute resolution is carried out through several mechanisms, such as deliberation, mediation, and lawsuits to the courts. Settlement of land acquisition disputes by referring to Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest and Law Number 38 of 2004 concerning Roads, especially those regulating the construction and management of toll roads. The main obstacles faced include disagreements regarding the compensation value, lack of public understanding of their rights, and administrative obstacles in the land assessment process. To overcome this problem, a more participatory approach is needed by involving the community from the start, transparency in determining the compensation value through an independent team, and legal assistance for affected residents.

The suggestions in this research are expected to improve the effectiveness of the land acquisition process and minimize the potential for future conflict. The results of this study can serve as recommendations for the government, officials, and law enforcement agencies in managing land acquisition conflicts, particularly for strategic infrastructure projects.

Keywords: Resolution Efforts, Land Acquisition, Toll Roads.